

## **Pemutusan Hubungan Diplomatik Malaysia dan Korea Utara pada tahun 2017-2018**

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan putusannya hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara yang sudah terjalin sejak lama, secara spesifik akan dijelaskan latar belakang negara Malaysia dan Korea Utara, sistem pemerintahan, dan hubungan bilateral dengan negara-negara lain, dan hubungan bilateral Malaysia dan Korea Utara, yang menyebabkan pemerintah Malaysia terpaksa melakukan tindakan **persona non-grata** terhadap Kang Chul selaku duta besar Korea Utara di Malaysia, begitu pula sebaliknya Korea Utara yang melakukan tindakan **persona non-grata** terhadap duta besar Malaysia.

Pemerintah Korea Utara juga melakukan penahanan warga Malaysia yang berada di Korea Utara, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Ada pula teknik pengumpulan data melalui penelitian pustaka (library research). Teori dan konsep yang di gunakan adalah konsep kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri yang di terapkan oleh pemerintah Malaysia terhadap Korea Utara yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat ulah dari Korea Utara, sehingga Malaysia dapat membuktikan bahwa mereka dapat menyelesaikan sendiri kasus didalam negaranya.

Kata kunci: Hubungan Diplomatik, Kebijakan Luar Negeri, Persona Non-Grata, Malaysia, Korea Utara

**Abstract :** This study purpose to describe the dissolution of diplomatic relations between Malaysia and North Korea, Specifically, the background of the problems of Malaysia and North Korea will be explained, the government systems and policies, bilateral relations with other countries, and the bilateral relations between Malaysia and North Korea, making the Malaysian government forced to make persona non-grata against Kang Chul as the ambassador of North Korea in Malaysia and contrarily North Korea who make a persona non-grata against the Malaysian ambassador. Then the North Korean government decides to hold Malaysians in North Korea , This study uses descriptive qualitative method using secondary data. As data collection techniques through library research. The theory and concept used is the concept of foreign policy, the foreign policy applied by the Malaysian government to North Korea which purpose to solve the problems that occur due to the actions of North Korea, so Malaysia will prove that they can resolve their own cases in their own country.

Keywords : Diplomatic Relations, Foreign Policy, Persona Non-Grata, Malaysia, North Korea

## **1. Latar Belakang Masalah**

Hubungan diplomatik antara Malaysia dan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) telah didirikan pada 30 Juni 1973. Sejak saat itu, hubungan bilateral telah tumbuh selama bertahun-tahun. Malaysia mendirikan kedutaannya di Pyongyang pada 28 Februari 2004. Dan pada Mei 2006, kedutaan dipindahkan dari

kantor sementara di Hotel Koryo ke gedung permanen di Munhung-dong Diplomatic Enclave, Distrik Daedonggang, Pyongyang. (Ministry of Foreign Affairs, 2018). Selama dekade terakhir, kerja sama antara kedua negara membaik. Hubungan diplomatik dengan Korea Utara selanjutnya ditetapkan setelah pemerintahnya pada tahun 2011 mengumumkan bahwa mereka akan membuka rute penerbangan ke negara itu dalam upaya untuk menarik lebih banyak wisatawan.

Satu-satunya maskapai penerbangan Korea Utara yaitu Air Koryo yang beroperasi di Pyongyang, Korea Utara dan Kuala Lumpur, Malaysia, dilaporkan akan didirikan berdasarkan charter. Selain itu, 300 pekerja Korea Utara dilaporkan bekerja di tambang batu bara Selantik di Sri Aman, Sarawak di bawah perjanjian khusus antara pemerintah negara bagian Sarawak dan pemerintah Korea Utara. (G.Surach, 2017). Pada pandangan pertama, hubungan Malaysia-Korea Utara mungkin tampak agak istimewa. Malaysia memiliki kedutaan yang disebut *hermit kingdom*<sup>1</sup> dan bahkan menikmati status langka perjalanan bebas visa dengan Pyongyang. Memberikan sejumlah perkembangan diskrit selama bertahun-tahun, termasuk pemberian penghargaan oleh universitas swasta Malaysia untuk Kim Jong-un.

Dalam prakteknya, tidak semua hubungan diplomatik selalu berjalan lancar karena kepentingan antara dua negara yang menjalin hubungan diplomatik akan mengalami perubahan seiring perkembangan kondisi perpolitikan internasional. Dalam beberapa kasus, suatu negara bahkan mengambil opsi pemutusan hubungan

---

<sup>1</sup> Istilah bagi negara atau organisasi yang dengan sengaja menutup dirinya baik secara metaphor ataupun fisik dari dunia lain

diplomasi untuk melindungi posisi kepentingan politik luar negerinya di lingkungan internasional. Pemutusan hubungan diplomatik merupakan keputusan unilateral suatu negara yang menutup perwakilan diplomatiknya. (Poetri, 2014).

Pada tahun 2017 lalu terjadi perseteruan hebat antara Korea Utara dan Malaysia, yang menyebabkan pengusiran duta besar dari masing-masing negara. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kerja sama yang sebelumnya telah dibangun oleh kedua negara. Sehingga mengharuskan pemerintah Malaysia dan Korea Utara untuk melakukan tindakan **persona non-grata**<sup>2</sup> pada diplomat di masing-masing negara. Diikuti dengan langkah melarang seluruh warga negara Malaysia yang berada di Korea Utara untuk keluar dari wilayah Korea Utara. Tindakan Korea Utara tersebut dibalas Malaysia dengan menyegel kedutaan besar Korea Utara dan memeriksa setiap pegawai dan warga Korea Utara yang keluar masuk kedutaan. Aksi berbalas reaksi tersebut sebenarnya merupakan tindakan normal dalam hubungan diplomatik, prinsip resiprositas.

Sekalipun aksi berbalas reaksi merupakan hal yang lumrah dalam ketegangan diplomatik, namun langkah melarang warga Malaysia yang hendak meninggalkan Korea Utara bukanlah suatu kewajiban. Mungkin tindakan tersebut merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh sebuah negara. Walaupun Pemerintah Korea Utara melalui kantor berita KCNA menjamin keamanan dan kebebasan warga Malaysia yang bekerja dan berkegiatan di Korea Utara selama larangan meninggalkan Korea Utara berlaku. Reaksi Malaysia relatif terukur dalam

---

<sup>2</sup> Perwakilan negara lain yang tidak diterima atau tidak dapat diterima di negara tertentu.

menyikapi tindakan Korea Utara, langkah penyegelan kedutaan besar Korea Utara merupakan pilihan rasional maksimum yang bisa dilakukan Malaysia. Lebih dari itu akan berisiko semakin memperburuk situasi, namun jika tidak melakukan apa-apa akan menjadi preseden dalam sejarah diplomasi Malaysia. Langkah komunikasi merupakan cara paling efektif untuk mengurai permasalahan diplomatik yang terjadi. Banyak pihak, termasuk Indonesia memiliki potensi menjadi penengah. Inisiatif jasa baik pemerintah Indonesia mungkin dapat diterima kedua pihak, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Malaysia dan Korea Utara, Indonesia juga memiliki orientasi luar negeri bebas dan aktif. Proses pembukaan hubungan diplomatik Malaysia dan Korut dilakukan di Jakarta pada tahun 1973. (Aditya, 2017).

## **2. Teori Kebijakan Luar Negeri**

Dalam Kamus Hubungan Internasional, politik luar negeri diartikan sebagai strategi atau aksi yang terencana yang telah dirumuskan oleh para pembuat keputusan dari sebuah negara terhadap negara lainnya atau lembaga internasional tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan spesifik terkait dengan kepentingan nasional negara tersebut. Foreign policy atau kebijakan luar negeri dipercaya sebagai representasi dari kuasa politik nasional suatu negara. (Ratih Herningtyas, 2015).

Studi William D. Coplin sangat membantu dalam pengkategorisasian kebijakan luar negeri dalam 3 kategori besar. Pertama, keputusan yang bersifat general. Keputusan ini merupakan fondasi dasar kebijakan luar negeri, sehingga keputusan ini akan ditempatkan sebagai *blue-print* bagi setiap proses pengambilan

keputusan. Agar kebijakan yang menjadi *plat-form* ini kuat, maka proses pembuatannya pun harus dilakukan secara mendalam dan melibatkan banyak pihak. Aktor dari kebijakan luar negeri ini adalah eksekutif tingkat tinggi. Seperti Presiden, atau Perdana Menteri. (Poetri, 2014).

Kedua, keputusan yang bersifat administratif. Dalam hal ini keputusan administratif menurut D Coplin sebagai keputusan yang bersifat operasional, yang dijalankan sehari-hari oleh negara dalam kaitannya sebagai aktor internasional. Seperti keputusan administratif banyak memiliki dimensi teknis daripada filosofis. Meskipun demikian tidak berarti keputusan administratif boleh dilakukan dengan sekedarnya, sama sekali tidak justru keputusan administratif ini akan menunjukkan apakah keputusan umum suatu negara itu efektif atau tidak. Sehingga keputusan administratif juga memiliki peran untuk mengkritik keputusan general. Tugas dan wewenang dari diplomat, konsul sudah ditentukan garis besarnya. Maka mereka tidak boleh mengambil keputusan di luar *frame* yang telah ditentukan. Jikalau harus mengambil keputusan di luar *frame* yang ada harus berdasarkan pertimbangan efektivitas, dan harus dikonsulkan kepada pihak struktur di atasnya. (Ratih Herningtyas, 2015).

Ketiga, keputusan yang bersifat krisis. Dalam pandangan D. Coplin keputusan kritis ditandai beberapa hal;

- a. Terbatasnya data yang tersedia.
- b. Terbatasnya waktu yang tersedia.
- c. Terancamnya kepentingan suatu negara.

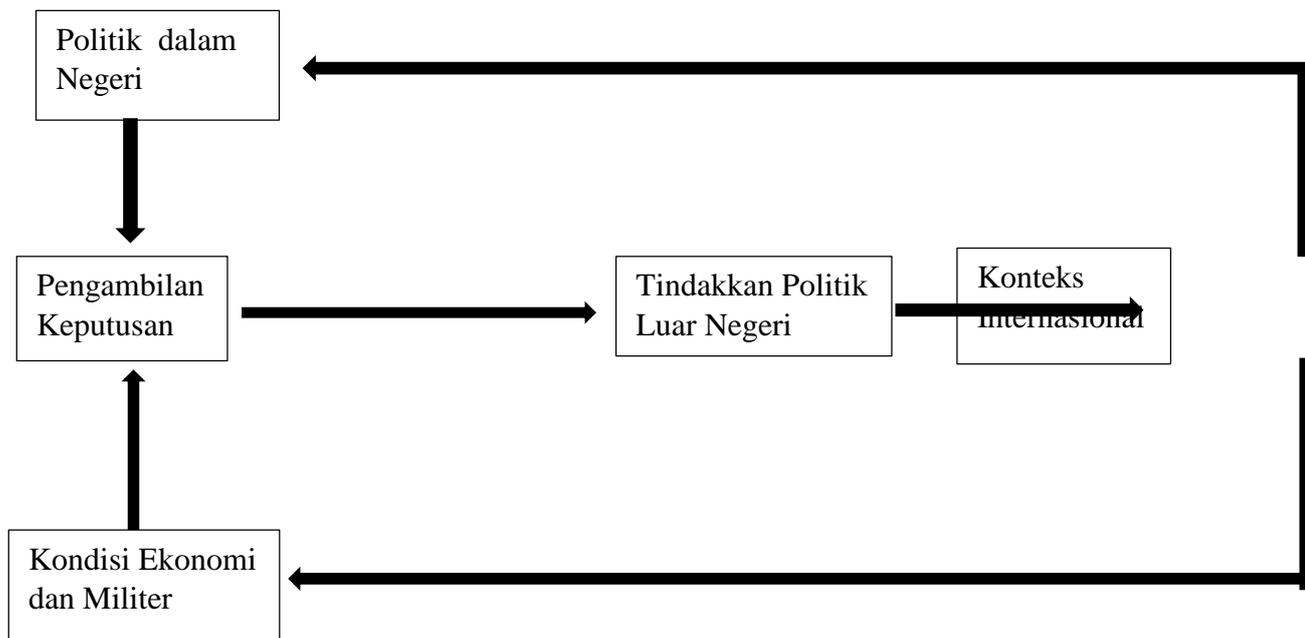
d. Dalam batas tertentu berdimensi jangka pendek. (Syahitaningrum, skripsi, 2016).

Gambar 1.3.1. Tabel Politik Luar Negeri menurut Willian D Coplin

Sumber : Ratih Herningtyas, Surwandono, dan Tulus Wasito, Jurnal Politik

Profetik Volume 6 Nomor 2, halaman 54-56, Menganalisi Diplomatik

Governance dalam Perumusan dan Artikulasi Politik Luar Negeri.



Kebijakan untuk mengusir diplomat adalah karena kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, pemerintah Malaysia telah memberlakukan kebijakan tentang masalah yang ada didalam negeri Malaysia bahwa setiap kejadian yang terjadi di dalam negeri jiran tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Malaysia. (Vania, 2017). Dengan ini jelas sudah bahwa peraturan yang ada di dalam negara harus di hormati.

Namun Duta Besar Korea Utara untuk Malaysia, Kang Chol tidak mengakui hasil otopsi yang dilakukan oleh tim Malaysia, menurutnya pihak Malaysia tidak

dapat dipercaya, karena bisa saja jasad Kim Jong Nam sudah dilakukan pemalsuan terhadap jenazah, karena pihak Malaysia telah melakukan otopsi tanpa izin dari pemerintah Korea Utara, dan hal tersebut menurutnya telah membuat citra Korea Utara rusak. Pemerintah Malaysia melakukan tindakan tegas dan berusaha untuk menemukan dan mencari tahu dalang di balik pembunuhan Kim Jong nam sebenarnya, karena Malaysia ingin menunjukkan kepada Korea Utara bahwa Malaysia dapat menyelesaikan kasus yang terjadi didalam negaranya tanpa campur tangan pihak lain. Namun ternyata justru Korea Utaralah dalang di balik pembunuhan Kim Jong Nam tersebut.

Kebijakan Malaysia tersebut dapat berdampak panjang bagi hubungan bilateral Malaysia dan Korea Utara sendiri, bagi Malaysia dengan mengeluarkan **persona non-grata**<sup>3</sup> terhadap Kang Chul selaku duta besar Korea Utara untuk Malaysia. Pemerintah Malaysia sendiri tidak dapat menangkap Kang Chul dikarenakan hak istimewa di negara penerima, maka Malaysia mengusir Kang Chul sebagai tanda bahwa Malaysia tidak percaya lagi kepada Korea Utara yang setelah diselidiki mencoba membunuh Kim Jong Nam. (Saju, 2017)

### 3. Pemutusan Hubungan Diplomatik Malaysia-Korea Utara

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengakui hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang tidak lagi sama seperti sebelum menindak lanjuti kasus pembunuhan Kim Jong-Nam yang memaksa Malaysia mengambil tindakan mengusir Duta Korea Utara, Kang Chol dari negara ini. Wakil Menteri Luar Negeri,

---

<sup>3</sup> Lihat latar belakang.

Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican, mengatakan setelah perkembangan terakhir, hubungan diplomatik antara Kuala Lumpur dan Pyongyang terpengaruh. Hubungan dua negara sudah tidak lagi sama seperti dulu. Reezal Merican mengatakan demikian ketika ditanya kemungkinan Kabinet akan meninjau hubungan diplomatik dengan Korea Utara setelah Kang Chol dinyatakan **persona non grata** dan diminta meninggalkan Malaysia dalam 48 jam. Untuk tindakan lebih lanjutnya, semua tindakan yang diambil setelah kasus ini didasarkan pada kepatuhan terhadap hukum internasional dan nasional. Pemerintah Malaysia tidak boleh memprediksi apa yang akan terjadi karena yang penting adalah melakukan semuanya dengan cara professional. (Nazura Ngah N. M., 2017).

Hwang Cheol-Hwan yang merupakan koresponden Partai Buruh Korea Utara, mengatakan bahwa petugas Malaysia telah mengkloning rekaman video CCTV tentang pembunuhan Kim Jong Nam, seorang pengacara untuk terdakwa kebangsaan Indonesia juga mengatakan polisi sengaja menghilangkan beberapa gambar. Tersangka telah diadili dengan tuduhan membunuh Kim Jong Nam dengan mengoleskan senjata kimia neuroleptik VX di wajah Kim Jong Nam, pada 13 Februari tahun lalu. Kedua orang tersangka telah ditangkap setelah dikawal ke Korea Utara, ditangkap karena dicurigai mengambil kamera rahasia untuk acara TV. Namun polisi dan jaksa Malaysia mengatakan mereka tidak melakukan kejahatan dengan maksud untuk membunuh. Spekulum juga disampaikan, dalam hal ini para terdakwa berhati-hati untuk tidak menyentuh cairan VX di muka Kim Jung Nam dan langsung pergi untuk mencuci tangan dengan cepat pergi ke kamar mandi, hal ini terekaman CCTV bandara sebagai bukti di pengadilan. (Chul, 2018).

Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr S Subramaniam mengatakan Korea Utara bisa menolak hasil atau menolak untuk melakukan bedah mayat. Karena setiap kasus di Malaysia yang melibatkan negara asing, negara tersebut memang harus mematuhi hukum yang ada di Malaysia. (Rosli, 2017). Pemuda Barisan Nasional (BN) mendesak pemerintah Malaysia untuk meninjau hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengakhiri perjanjian bebas visa antara kedua negara, sesegera mungkin. Wakil Ketua Pemuda BN, Khairul Azwan Harun, mengatakan desakan itu menindak lanjuti beberapa pernyataan angkuh dari Kedutaan Korea Utara yang dianggap 'invasi' terhadap proses hukum dan kedaulatan Malaysia. Meskipun kedua negara memperoleh manfaat dari perjanjian bilateral dan hubungan perdagangan, Malaysia tidak akan mentoleransi setiap sikap kasar yang menghina kedaulatan Malaysia. (Adnan, 2017).

Pernyataan yang bersifat tuduhan dan fitnah tidak berdasar oleh Kedutaan Korea Utara tampaknya menggambarkan hukum negara ini terbuka pada intervensi asing, manipulasi agenda tersembunyi, serta tidak mampu menemukan solusi yang adil. Tidakkannya tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara tidak menghormati kedaulatan Malaysia. Desakkan ini menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan rakyat Malaysia apa bila aturan hukum negara ini didiskusikan sesuka hati oleh pihak luar. Sebelumnya, Khairul Azwan ditemani sekitar 50 perwakilan pemuda BN dan LSM (NGO) mengirim nota protes kepada Kedutaan Korea Utara. Surat protes itu diterima oleh permewakilan Kedutaan Korea Utara. Khairul Azwan mengatakan, pihaknya tidak ragu untuk membuat demonstrasi lebih besar di depan

kedutaan jika Korea Utara bersikeras dan melanjutkan serangkaian fitnah dan tuduhan mereka terhadap Malaysia. (Adnan, 2017).

Penting bagi suatu negara untuk memahami bahwa prinsip hubungan antar negara yang didasarkan pada kepercayaan dan kebijaksanaan para pemimpin dalam penentuan gerakan politik dan diplomasi regional. Pemerintah Malaysia sendiri memilih untuk memecahkan masalah yang muncul di antara negara-negara melalui cara-cara pembicaraan bilateral dan dialog antar negara yang lebih halus. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak akan bertindak dengan bijaksana menyelesaikan persoalan ini setelah diplomasi Pemerintah Malaysia terbukti efektif dalam beberapa peristiwa lampau seperti klaim jenazah MH17 dan negosiasi sandera dengan kelompok Abu Sayyaf. (Zainuddin, 2017).

Sumber dari wawancara dengan Presiden Gerakan Keadilan Dunia, Dr Chandra Muzaffar mengatakan tentang hubungan Malaysia-Korea Utara yang terbaru. Malaysia dan Korea Utara sangat tegang pada saat ini. Ada beberapa faktor yang perlu diselesaikan untuk mengakhiri ketegangan diplomatik ini. Yaitu, mengenai sanksi oleh Pyongyang terhadap warga Malaysia di luar negeri, serta larangan Malaysia pada orang Korea Utara di negara itu. Selanjutnya, penyelesaian penyelidikan kasus pembunuhan pemimpin Kim Jong-nam Korea Utara pada 13 Februari. Malaysia perlu membujuk Korea Utara untuk menerima penyelidikan atas gugatan itu, dengan demikian membantu menemukan dalang atas kasus pembunuhan itu. Saya yakin kasus ini membutuhkan waktu dan tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, beberapa bulan atau sepanjang tahun. Itu tergantung pada masalah yang lebih besar, siapa yang lebih bertanggung jawab dan

bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Krisis hanya dapat diselesaikan dengan cepat jika Korea Utara bekerja sama, tidak terus keras kepala dan tidak akan mencari layanan dari pihak manapun untuk penyelesaian dalam kasus ini. (Idris, 2017).

#### **4. Desakan masyarakat Malaysia**

Kasus pembunuhan Kim Jong Nam di Kuala Lumpur Internasional Airport 2 (KLIA 2) pada 13 Februari 2017 lalu menjadi sorotan masyarakat Malaysia dan masyarakat internasional, hal ini disebabkan karena pembunuhan kakak tiri presiden Korea Utara tersebut dilakukan di negara terdekatnya yaitu Malaysia yang merupakan negara yang sangat terbuka dan sangat dekat dengan Korea Utara, terutama tersangka pembunuhan terdapat satu warga melayu bernama Muhammad Farid Jalaluddin (26) yang telah ditangkap pada 17 Februari 2017 lalu oleh Kepolisian Malaysia, di sebuah kondominium di Kuala Lumpur. Selain itu ada dua wanita bernama Doan Thi Huong (28) asal Vietnam dan Siti Aisyah (25) asal Indonesia (Christiastuti, 2017), kepolisian Malaysia menggeledah sebuah apartemen di Kuala Lumpur, berbagai zat kimia ditemukan di dalam apartemen di Jalan Klang Lama, Kuala Lumpur penggeledahan terkait dengan upaya tim forensik untuk melacak zat kimia yang digunakan dalam pembunuhan Kim Jong Nam. Selain menemukan dan menyita berbagai zat kimia, kepolisian juga menemukan sejumlah sarung tangan dan sepatu dari dalam kondominium itu. (detikNews, 2017).

Tidak diketahui siapa pemilik kondominium itu. Namun kepolisian diberitahukan untuk ke kondominium itu oleh seorang pria Malaysia berusia 30-an tahun. Identitas pria itu tidak diketahui pasti. peran pria Malaysia tersebut dalam kasus pembunuhan Kim Jong Nam juga belum jelas. Ada yang mengatakan bahwa pria Malaysia tersebut memiliki keterkaitan dengan salah satu tersangka yang telah ditahan. Yaitu wanita Vietnam bernama Doan Thi Huong (28), wanita Indonesia bernama Siti Aisyah (25), pria Korut bernama Ri Jong-Chol (47) dan pria Malaysia bernama Muhammad Farid Jalaluddin (26). Doan, Aisyah dan Jong-Chol berstatus tersangka, sedangkan Farid berstatus sebagai saksi.. Diyakini bahwa kepolisian mendatangi pria Malaysia tersebut setelah salah satu tersangka menyebut namanya pria tersebut kepolisian Malaysia menduga mungkin pria tersebut merupakan ahli dalam bidang obatan kimia. Pria Malaysia tersebut awalnya didatangi polisi di kondominium berbeda yang tidak jauh dari kondominium yang diledakkan. Saat pengeledhan terjadi terlihat ada satu mobil pemadam kebakaran, dua kendaraan lain milik Dinas Pemadam Kebakaran dan satu mobil forensik kepolisian di lokasi. Kemudian sekitar 10 petugas pemadam kebakaran berjalan keluar dengan membawa pakaian hazmat dan tangki oksigen. Sejumlah tim forensik kepolisian juga terlihat memasuki area yang sama dengan membawa peralatan khusus. (detikNews, 2017).

Wanita warga negara Indonesia (WNI) bernama Siti Aisyah yang ditangkap terkait pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, ditangkap polisi Malaysia saat bersembunyi di hotel setempat. Siti Aisyah ditangkap kepolisian Malaysia pada 16 Februari, sekitar pukul 02.00 waktu

setempat. Sehari sebelumnya, seorang wanita berpaspor Vietnam atas nama Doan Thi Huong ditangkap di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) saat akan terbang ke Vietnam. Menurut kepolisian setempat, Siti Aisyah diduga telah meninggalkan wanita berpaspor Vietnam itu sendirian dan mengungsi ke sebuah hotel di kawasan Ampang, Kuala Lumpur. Dan Siti Aisyah menunggu 'situasi aman' untuk kabur dari Malaysia. Sebelum menangkap Siti Aisyah, polisi Malaysia terlebih dahulu menangkap seorang pria Malaysia yang disebut sebagai kekasih WNI asal Serang itu. Pria bernama Muhammad Farid Jalaluddin itu memberikan informasi kepada polisi soal keberadaan Siti Aisyah. (Novi Christiastuti, 2017).

Banyak negara yang spekulasi bahwa pemerintah Malaysia telah bekerjasama dengan Korea Utara untuk membunuh Kim Jong Nam di Malaysia. Karena Malaysia merupakan tempat transaksi jual beli illegal yang dilakukan pihak Korea Utara, Malaysia juga sangat terbuka dan mendapatkan banyak keuntungan dari hubungan diplomatiknya dengan Korea Utara. Terutama saat ditangkapnya Farid yang berwarganegara Malaysia yang ikut dalam kasus pembunuhan bersama pacarnya Siti yang merupakan warganegara Indonesia.

Dikatakan bahwa kepolisian Malaysia memastikan status Farid bukan merupakan tersangka dalam kasus ini. Saat mendatangi hotel di Ampang, personel kepolisian Malaysia langsung menggerebek salah satu kamar hotel yang ada di lantai tiga dan mendapati Siti Aisyah di dalamnya. Sumber kepolisian menyebut, Siti Aisyah tinggal di hotel itu seorang diri setelah kabur dari bandara usai menghabisi Kim Jong Nam. Kamar hotel itu tidak dikunci saat polisi datang menggerebek. Dijelaskan bahwa kekasih Siti Aisyah mengaku telah

mengantarkannya ke hotel di Ampang itu, dari sebuah hotel di Bandar Baru Salak Tinggi yang sempat ditinggalinya bersama wanita berpaspor Vietnam. Baik Siti Aisyah maupun wanita berpaspor Vietnam itu sempat terekam CCTV bandara di hari kejadian 13 Februari maupun sehari sebelum kejadian, 12 Februari. wanita berpaspor Vietnam mengaku kepada polisi bahwa dirinya ditipu oleh empat pria dan satu wanita untuk mengerjakan Jong-Nam. Wanita ini juga menyebutkan, dirinya dan lima orang itu sempat bersama-sama pergi ke sebuah hotel di Bandar Baru Salak Tinggi. Namun tiba-tiba wanita ini ditinggal sendiri oleh kelima orang itu. (Novi Christiastuti, 2017).

Pemuda Barisan Nasional (BN) mendesak pemerintah Malaysia untuk meninjau hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengakhiri perjanjian bebas visa antara kedua negara, sesegera mungkin. Wakil Ketua Pemuda BN, Khairul Azwan Harun, mengatakan desakan itu menindak lanjuti beberapa pernyataan angkuh dari Kedutaan Korea Utara yang dianggap 'invasi' terhadap proses hukum dan kedaulatan Malaysia. Meskipun kedua negara memperoleh manfaat dari perjanjian bilateral dan hubungan perdagangan, Malaysia tidak akan mentoleransi setiap sikap kasar yang menghina kedaulatan Malaysia. (Adnan, 2017).

Pernyataan yang bersifat tuduhan dan fitnah tidak berdasar oleh Kedutaan Korea Utara menggambarkan hukum negara Malaysia terbuka pada intervensi asing, manipulasi agenda tersembunyi, serta tidak mampu menemukan solusi yang adil. Tidakkannya tersebut menunjukkan bahwa Korea Utara tidak menghormati kedaulatan negara ini. Desakkan dari pemuda BN menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan

rakyat Malaysia apabila aturan hukum negara ini didiskusikan sesuka hati oleh pihak luar. Sebelumnya, Khairul Azwan ditemani sekitar 50 perwakilan pemuda BN dan LSM (NGO) mengirim nota protes kepada Kedutaan Korea Utara. Surat protes itu diterima oleh permewakilan Kedutaan Korea Utara. Khairul Azwan mengatakan, pihaknya tidak ragu untuk membuat demonstrasi lebih besar di depan kedutaan jika Korea Utara bersikeras dan melanjutkan serangkaian fitnah dan tuduhan mereka terhadap Malaysia. (Adnan, 2017).

Korea Utara nyatanya membuat kesalahan ketika mengklaim tindakan tidak wajar kepada pemerintah Malaysia dalam isu pembunuhan Kim Jong-nam dan meminta supaya pemerintah Malaysia tidak melanjutkan penyelidikan kasus, menyerahkan mayat korban dengan alasan korban hanya mati mendadak. Hal ini tidak dapat diterima karena kita harus memegang teguh negara yang berdaulat berdasarkan aturan hukum dan konstitusi konstitusi. Korea Utara perlu memahami bahwa apa yang terjadi di Malaysia adalah kasus pembunuhan dan bukan kasus kematian biasa seperti kecelakaan dan sebagainya. Ini membutuhkan penyelidikan terperinci sesuai dengan fondasi negara ini yang menjunjung kebenaran melalui proses hukum. Dalam memerangi malapetaka yang memuncak antara Malaysia dan Korea Utara, Pemerintah Malaysia harus bertindak lebih tegas, dengan metodologi menyeluruh dalam memutuskan dan menemukan cara terbaik untuk membebaskan warga Malaysia di Korea Utara untuk memperbaiki hubungan antara kedua pemerintah. Pada saat yang sama kita perlu menekankan bahwa kedaulatan Malaysia bukanlah sesuatu yang bisa dibingungkan. (Zainuddin, 2017).

Penting bagi suatu negara untuk memahami bahwa prinsip hubungan antar negara yang didasarkan pada kepercayaan dan kebijaksanaan para pemimpin dalam penentuan gerakan politik dan diplomasi regional. Pemerintah Malaysia sendiri memilih untuk memecahkan masalah yang muncul di antara negara-negara melalui cara-cara pembicaraan bilateral dan dialog antar negara yang lebih halus. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Razak akan bertindak dengan bijaksana menyelesaikan persoalan ini setelah diplomasi Pemerintah Malaysia terbukti efektif dalam beberapa peristiwa lampau seperti klaim jenazah MH17 dan negosiasi sandera dengan kelompok Abu Sayyaf. (Zainuddin, 2017).

Mustapa selaku perwakilan UMNO dan Komite perwakilan pemuda BN Kelantan ketikaditanya tentang hubungan perdagangan dengan Korea Utara, mengatakan Malaysia masih mengejar hubungan diplomatik dengan negara dan masalah perdagangan yang melibatkan sektor swasta. Perdagangan ini adalah bisnis swasta, jika ada permintaan dan penawaran. Hal tersebut kembali lagi kepada keputusan dari Kementerian Luar Negeri. Malaysia mempertimbang mengusir duta Korea Utara dari Malaysia atau menutup kedutaannya di Pyongyang, ketika ketegangan meningkat sehubungan pembunuhan abang pemimpin negara itu, Kim Jong-un, menurut seorang pejabat senior pemerintah. Kim Jong Nam, dibunuh di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA 2) pada 13 Februari ketika menunggu penerbangan ke Makau tempat ia tinggal bersama keluarganya di bawah perlindungan Beijing. Duta besar Korea Utara di sini, Kang Chol, mengatakan pekan lalu negaranya "tidak bisa percaya" cara Malaysia mengelola penyelidikan

dan menuduh Malaysia "berkonspirasi dengan pihak luar", mengacu pada musuhnya, Korea Selatan. (Rosli, 2017).

Kementerian Kesehatan akan mengambil tindakan lanjutan atas pengelolaan tubuh, Kim Jong-Nam berdasarkan arahan keluarga kepada Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM). Datuk Seri Dr S Subramaniam, mengatakan bahwa perintah tersebut harus sesuai dan mengikat secara hukum. Keputusan apa pun harus dibuat sesuai dengan arahan polisi karena ini adalah kasus hukum medis. Pemerintah berharap ahli waris tidak terlambat untuk melihat tubuh Kim Jong Nam sesuai dengan prosedur yang biasa. Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid dilaporkan telah mengatakan identitas tubuh Kim Jong Nam, dikonfirmasi melalui sampel DNA dari almarhum putranya sendiri. Sebagai Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar mengatakan, proses identifikasi tubuh Kim Jong Nam sesuai dengan setiap prosedur forensik dan DNA yang diperlukan. (Fuad, 2017).

Beberapa diskusi dimasyarakat dan pemerintahan mencoba mencari tahu alasan Korea Utara membunuh Kim Jong-nam. Pemerintah Malaysia telah secara paksa mendeportasi Lee Chung Chul, seorang warga Korea Utara, yang merupakan tersangka dalam kasus tersebut, mengatakan, "Tidak ada bukti untuk membuktikan tuduhan itu." Pada kenyataannya, bahkan cakupan, verifikasi juga, laporan media Korea Utara tidak memerlukan koreksi. Masalahnya adalah sulit bagi siapa pun untuk mempertanyakan alasan kecurigaan bahwa pelaku pembunuhan adalah 'Korea Utara'. (Yoon, 2017).

## 5. Dukungan dari Negara Asing

### a. Indonesia

Pemerintah Indonesia pun ikut turun tangan dalam persidangan Siti, salah satu warganegara Indonesia di Malaysia yang di duga sebagai pembunuh Kim Jong Nam, dan mengutus seorang pengacara dan jaksa untuk membantu menangani kasus tersebut, yaitu Gooi. Disebutkan oleh Gooi bahwa dakwaan yang dijeratkan kepada kliennya sangat 'samar'. (Jaksa) Gagal untuk menyusun kasus *prima facie*<sup>4</sup> terhadap terdakwa yaitu Siti Aisyah. . Ditegaskan Gooi bahwa jaksa sama sekali tidak bisa membuktikan kliennya telah mengusapkan racun gas saraf VX ke wajah Kim Jong Nam. Tidak hanya itu, menurut Gooi, jika memang Aisyah adalah pembunuh, lantas mengapa dia memberitahu teman-teman dan keluarga secara antusias soal acara lelucon yang akan diikutinya. Gooi juga menyatakan bahwa sangat tidak wajar jika Aisyah tidak mengalami gejala apapun setelah terkena kontak dengan racun gas saraf VX yang mematikan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengkategorikan gas saraf VX sebagai senjata pemusnah massal. Empat warga Korut yang dituding terlibat pembunuhan ini, telah kabur dari Malaysia usai pembunuhan terjadi. Mereka diyakini telah kembali ke negaranya, Korut. Pengacara Aisyah dan Doan sama-sama menyebut empat warga Korut itu telah membayar kedua klien mereka untuk melakukan hal yang sejak awal diyakini sebagai 'lelucon' untuk acara televisi. (Christiastuti, 2018).

---

<sup>4</sup> *Prima facie* merupakan sebutan untuk bukti yang cukup untuk menetapkan fakta.

## **b. Amerika**

Seorang penyidik veteran telah meminta PBB untuk menunjuk ahli hukum internasional untuk memberikan proses hukum untuk mengadili pemimpin Korea Utara atas kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan. Panggilan dibuat ketika terjadinya perselisihan internasional atas pembunuhan Kim Jong Nam, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un serta kritiknya terhadap pemerintahannya di Malaysia. Komisi penyelidikan PBB melalui laporan pada 2014 setelah melakukan wawancara dan sidang umum dengan pembelot negara itu, mengumpulkan banyak kasus pelanggaran hukum di Korea Utara, termasuk kamp tahanan besar, kelaparan dan hukuman mati, dikatakan wajar diajukan ke Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). (Reuters, 2017).

Menurut mantan Kepala Central Intelligence Agency (CIA), John Brennan semua petunjuk menyatakan bahwa Pyongyang bertanggung jawab atas pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Nam. Brennan yang pernah menjabat sebagai Direktur CIA sampai Januari membuat pernyataan tersebut dalam wawancara bersama CBS, 'Face the Nation ', tindak lanjut untuk bertemu dengan polisi Malaysia membahas mengenai racun VX<sup>5</sup> yang digunakan dalam pembunuhan Kim Jong-nam di Kuala Lumpur International Airport (KLIA 2) pada 13 Februari lalu. (Yonhap, 2017).

VX adalah senjata kimia yang terdaftar sebagai senjata pemusnah masif (WMD) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan penggunaannya dilarang di

---

<sup>5</sup> Lihat Bab III

bawah Konvensi Senjata Kimia. Dengan penemuan ini maka semakin memperkuat tuduhan pembunuhan terhadap Pyongyang. Terdapat 8 warga Korea Utara termasuk mereka yang memegang paspor diplomat atau resmi, dijadikan sebagai tersangka dalam kasus itu, namun Pyongyang menyangkal keterlibatan mereka dan mengklaim Korea Selatan bersekongkol dengan Malaysia untuk menuduh negara komunis itu. Brennan mengatakan penggunaan senjata VX menunjukkan bahwa pemimpin Pyongyang terus menggunakan cara yang fatal untuk menghilangkan siapa saja yang menghina pemerintahan internal atau siapa saja yang tidak mendukungnya. Dalam upaya memperkuat kekuasaannya sejak mengambil alih kepemimpinan setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il pada akhir 2011, pemimpin Korea Utara itu menghukum mati sejumlah anggota senior pemerintah dan pejabat militer, termasuk pamannya sendiri. (Yonhap, 2017).

### c. **Korea Selatan**

Korea Selatan percaya bahwa rezim Korea Utara terkait dengan pembunuhan Kim Jong-nam. Dan rezim Korea Utara adalah dalang dalam insiden ini karena lima tersangka adalah warga Korea Utara. Polisi Malaysia menangkap salah satu tersangka dan mencoba melacak empat tersangka yang tersisa. Wakil Inspektur Jenderal Polisi, Datuk Seri Noor Rashid Ibrahim, mengatakan tersangka terbaru diidentifikasi. Dia mengatakan pria itu meninggalkan Malaysia pada hari yang sama Jong-nam terbunuh. Dapat dipahami bahwa keempat tersangka menggunakan paspor biasa dan bukan paspor diplomatik. (BBC, 2017).

Kepastian pembunuhan Kim Jong-nam dikemukakan Presiden Korsel, Hwang Kyo Ahn. Menurutnya, jika pemerintah Korea Utara terkait, pembunuhan itu menunjukkan "kebrutalan dan sifat tidak berperikemanusiaan" rezim Korea Utara. Sejauh ini, penyebab kematian Kim Jong Nam dan siapa pembunuhnya masih menjadi tanda tanya. Sejumlah saksi mata menyebut Jong-nam telah diracun, namun hal ini masih harus dipastikan melalui uji forensik. Bagaimanapun, kata Presiden Korea Selatan, Hwang Kyo Ahn, pihaknya masih mengawasi pergerakan Korea Utara secara saksama. Kim Jong-nam dilaporkan telah menjadi target pembunuhan selama beberapa waktu terakhir. Seorang mata-mata Korea Utara yang dipenjara di Korsel pada 2012 dilaporkan mengaku mengatur pembunuhan terhadap Kim Jong Nam yang tampak seperti kecelakaan tabrak-lari. Bukan kali pertama Korea Utara terlibat dalam pembunuhan, penculikan, dan serangan yang melibatkan agen rahasia. Pada 1968, sebanyak 31 prajurit elite Korea Utara dikirim ke Korea Selatan untuk menembus rumah dinas kepresidenan dan membunuh Presiden Park Chung Hee. Upaya itu gagal dan sebagian besar prajurit Korea Utara dibunuh. Lalu pada 1970-an dan 1980-an, sejumlah warga Jepang diculik oleh agen rahasia Korea Utara untuk melatih mata-mata Korea Utara budaya dan bahasa Jepang. (bbc, 2017).

Media Korea Selatan Yonhap mengabarkan, bahwa Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, tewas di bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Menurut Yonhap, Kim Jong-nam, 45 tahun, tewas kemarin pagi karena disuntik racun. Media lain yang mengutip sumber pemerintah mengatakan

dia tewas setelah disuntik racun oleh dua wanita di bandara. Dua wanita itu diyakini agen dari Korea Utara dan masih buron polisi. (Wijaya, 2017).

## **6. Kesimpulan**

Hubungan diplomatik Malaysia dan Korea Utara telah terjalin sejak 30 Juni 1973, dalam hubungan antara kedua negara telah banyak melahirkan perjanjian dan kesepakatan baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan kebudayaan, hubungan bilateral antara Malaysia dan Korea Utara dapat dikatakan hubungan yang cukup harmonis dan special, Karena Malaysia merupakan satu-satunya negara yang dapat melakukan perjalan tanpa visa ke Korea Utara, meskipun Korea Utara memiliki beberapa hubungan diplomatik dengana negara lain Malaysiala yang menjadi negara pertama didunia yang mendapatkan kebebasan akses ke Korea Utara ini. Selain itu Korea Utara memiliki maskapai penerbangannya sendiri di Malaysia, yaitu Air Koryo yang merupakan pesawat produksi Korea Utara.

Namun hubungan diplomatik memang tidak selalu berjalan mulus, karena seiring berjalannya waktu kepentingan setiap negara akan berubah, seiring dengan perubahan perpolitikan internasiona, terutama jika ada permasalahan dan konflik yang terjadi diantara dua negara. Sebenarnya terjadinya pemutusan diplomatik adalah hal yang biasa jika di tinjau dari kovensi wina tentang hubungan diplomatik antar negara. Terutama negara yang berbeda ideologi sejak awal, meskipun memiliki hubungan yang cukup baik.

Di dalam tulisan ini penulis ingin menyampaikan bagaimana kebijakan luar negeri yang diterapka oleh pemerintah Malaysia dan pemerintah Korea Utara, serta

ideologi yang diterapkan di negara masing-masing, dengan melihat kebijakan serta ideologi yang dianut oleh masing-masing negara maka kita dapat mengetahui mengapa Malaysia dan Korea Utara yang menjalin hubungan yang sangat harmonis ini menjadi saling tuding, saling menyalahkan dan saling mengusir duta besar masing-masing negara. Dapat dilihat dalam teori kebijakan luar negeri menurut William D Coplin bahwa terdapat 3 sebab pengambilan keputusan, yang pertama keputusan yang bersifat general, yang kedua yang bersifat administrative, dan yang ketiga yang bersifat krisis. Actor yang pembuat kebijakan juga merupakan komponen penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri.

Malaysia yang melakukan otopsi kepada jenazah Kim Jong Nam mengatakan bahwa Kim benar terbunuh karena racun VX, dan masih menyelidiki siapa dalang dibalik pembunuhan ini, karena ada 4 orang warga negara Korea Utara yang terbang ke Macau pada hari pembunuhan, Malaysia yang berkerjasama dengan INTELPOL sedang mencari keberadaan 4 orang tersebut. Selain itu Malaysia juga menemukan bahwa ada salah satu pekerja di Kedutaan Korea Utara yang ada di Kuala Lumpur yang termasuk kedalam tersangka pembunuhan, namun tentu saja tidak bisa di periksa begitu saja dikarenakan adanya hak kekebalan.

Banyak negara yang mengatakan bahwa Korea Utara merupakan dalang di balik pembunuhan tersebut, namun ada juga yang mengatakan bahwa Korea Utara telah bekerjasama dengan Malaysia untuk melakukan pembunuhan tersebut, hal ini terbukti dengan adanya warga Malaysia yang terlibat didalam kasus tersebut, namun pihak Malaysia mengkonfirmasi bahwa warga tersebut hanya sebagai saksi, pemerintah Malaysia juga menyayangkan pemerintah Korea Utara melakukan

pembunuhan di Malaysia, karena hal tersebut telah melanggar dalam konstitusi Malaysia, yaitu menjaga perdamaian abadi serta bebas aktif dalam setiap organisasi internasional, dan pemerintah Korea Utara telah mencoreng nama baik dan harkat martabat Malaysia di mata internasional.

Selain itu tuduhan Kang Chol selaku duta besar Korea Utara mengatakan bahwa Malaysia berkerjasama dengan Korea Selatan untuk menjatuhkan Korea Utara. Setelah mendengar pemberitahuan ini kumpulan pemuda BN mendesak pemerintah Malaysia untuk segera bertindak terhadap perlakuan Korea Utara, akhirnya Malaysia melakukan persona non-grata terhadap Kang Chol, dan menarik Duta Besar Malaysia di Korea Utara, namun Korea Utara menahan warganegara Malaysia di Korea Utara. Hal tersebut tentu membuat Pemerintah Malaysia semakin geram.

## Bibliography

- Aditya, I. (2017). *Malaysia dan Korea Utara*. Retrieved from [http://krjogja.com/web/news/read/26846/Malaysia\\_dan\\_Korea\\_Utara](http://krjogja.com/web/news/read/26846/Malaysia_dan_Korea_Utara)
- Adnan, A. S. (2017). *Tinjau Hubungan Diplomatik dengan Korea Utara*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/252067>
- AFP. (2017). *AS sahkan Korea Utara bunuh Kim Chol guna agen VX*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/dunia/amerika/2018/03/396603/sahkan-korea-utara-bunuh-kim-chol-guna-agen-vx>
- Agensi. (2017). *AS percaya ejen Korea Utara bunuh Kim Jong Nam*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/248440>
- Ali, A. J. (2017). *Identiti 4 lelaki kes bunuh Kim Chol didedah*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/berita/kes/2017/11/347355/identiti-4-lelaki-kes-bunuh-kim-chol-didedah>
- Alias, S. A. (2017). *Jong-nam mati akibat serangan jantung - Korea Utara*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/255121>
- Bakar, B. (2017). *Korea Utara: PAS sokong ketegasan kerajaan*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/257468>
- BBC. (2017). *Korea Selatan percaya Pyongyang bunuh Jong-nam*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/250445>
- bbc. (2017). *Korsel pastikan abang tiri Kim Jong-un dibunuh di Malaysia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38978443>
- Bername/AP. (2017). *Kerajaan putuskan tindakan terhadap mayat Jong-nam*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/264297>
- Christiastuti, N. (2017). *Korsel: Pembunuhan Kim Jong-Nam Dirancang 2 Kementerian Korut*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d-3433439/korsel-pembunuhan-kim-jong-nam-dirancang-2-kementerian-korut>
- Christiastuti, N. (2018). *Pengacara Siti Aisyah Sebut Penyelidikan Kasus Kim Jong-Nam Bobrok*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/4086419/pengacara-siti-aisyah-sebut-penyelidikan-kasus-kim-jong-nam-bobrok>
- Chul, H. (2018). *김정남 암살 피고인 "말레이 검경, 범행 동영상 짜깁기" 주장*. Retrieved from <https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20180314176700104>
- Cipto, B. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Daulay, H. (2013). *Memahami Persaingan Politik Malaysia*. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2013/05/08/02530979/memahami.persaingan.politik.malaysia>
- detikNews, N. C. (2017). *Geledah Apartemen Kuala Lumpur, Polisi Temukan Bahan-bahan Kimia*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/3430991/geledah-apartemen-kuala-lumpur-polisi-temukan-bahan-bahan-kimia>
- Foreign Policy, M. (2018). *Foreign Policy*. Retrieved from <http://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-policy>
- Fuad, R. I. (2017). *Kementerian Kesehatan akan mengambil tindakan lanjutan atas pengelolaan tubuh, Kim Jong-Nam berdasarkan arahan keluarga kepada Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM)*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/260652>
- G.Surach. (2017). *Malaysia-North Korean ties low-key but stable since 1973*. Retrieved from <http://www.thesundaily.my/node/427878>
- Hamid, N. (2017). *Hubungan KL-Pyongyang: Beijing dicadang orang tengah*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/257148>
- Herald, T. K. (2017). *Seoul bangkitkan ancaman senjata biokimia Pyongyang*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/253135>
- Idris, R. (2017). *Rugi putus hubungan KL-Pyongyang*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/259716>
- Kompas. (2017). *Pembunuhan Kim Jong Nam Cerminkan Ketidakstabilan di Korut*. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2017/02/25/08115521/pembunuhan.kim.jong.nam.cerminkan.ketidakstabilan.di.korut>
- Mahmood, A. (2017). *Malaysia rasa terhina dengan kenyataan Kang Chol*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/252812>
- Ministry of Foreign Affairs, M. (2018). *Official Website of Embassy of Malaysia, Pyongyang*. Retrieved from [http://mw.kln.gov.my/web/prk\\_pyongyang/history](http://mw.kln.gov.my/web/prk_pyongyang/history)
- Muhaimin. (2017). *Korut Salahkan Malaysia atas Kematian Kim Jong-nam*. Retrieved from <https://international.sindonews.com/read/1182527/40/korut-salahkan-malaysia-atas-kematian-kim-jong-nam-1487808271>
- Muhammad, F. (2017). *Pembunuhan Kim Jong Nam: Kedaulatan Malaysia Vs HAM*. Retrieved from <https://geotimes.co.id/kolom/hukum/pembunuhan-kim-jong-nam-kedaulatan-malaysia-vs-ham/>
- Nazura Ngah, N. M. (2017). *Kes Jong-nam: Hubungan diplomatik KL-Pyongyang terjejas*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/256594>

- Novi Christiastuti, d. (2017). *Siti Aisyah Ditangkap Saat Bersembunyi di Hotel Ampang Malaysia*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d-3425061/siti-aisyah-ditangkap-saat-bersembunyi-di-hotel-ampang-malaysia%7CSiti>
- Omar, R. a. (2010). *Dasar Luar Malaysia Era Dato' Seri Mohd Najib Tun Razak: Keutamaan Dalam Aspek Hubungan Dua Hala*. Sintok: Universitas Utara Malaysia.
- Ratih Herningtyas, S. d. (2015). Menganalisis Diplomatik Governance dalam Perumusan dan Artikulasi Politik Luar Negeri. *Jurnal Politik Profetik Volume 6 Nomor 2*, 52, 54-56.
- Rohman, M. A., & Karim, N. H. (2017). *Malaysia adil, munasabah kendali kes Jong-nam*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/262820>
- Rosli, F. A. (2017). *Korea Utara diminta hormat undang-undang Malaysia*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/249922>
- Saju, P. S. (2017). *Lima Hal tentang Perang Diplomasi Korut dan Malaysia*. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2017/03/07/15371031/lima.hal.tentang.perang.diplomasi.korut.dan.malaysia>
- Seoul. (2017). *Media Korea Utara tuduh Malaysia politikkan kematian Jong-nam*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/251995>
- Vania, R. (2017). *Soal Autopsi Kim Jong Nam, Malaysia: Korut Harus Ikuti Proses Hukum Kami*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/02/19/soal-autopsi-kim-jong-nam-malaysia-korut-harus-ikuti-proses-hukum-kami>
- Wijaya, P. (2017). *Kakak Kim Jong-un tewas dibunuh di Malaysia*. Retrieved from <https://www.merdeka.com/dunia/kakak-kim-jong-un-tewas-dibunuh-di-malaysia.html>
- Yonhap. (2017). *Semua petunjuk menuding ke Korea Utara*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/253539>
- Yoon, Y. (2017). *북한 소행이다 라면, 닥치고 믿어야 하나?* Retrieved from <http://m.mediatoday.co.kr/?mod=news&act=articleView&idxno=135453#Redyho#csidx2e432452a8d1ad7b11273332e652b1c>
- Zainuddin, A. (2017). *Diplomasi harmoni selesai isu Malaysia-Korea Utara*. Retrieved from <https://www.bharian.com.my/node/260130>